

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. (Jakarta: Haji Masagung, 1994).
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, dan Konvergensi Kebijakan*. (Jakarta: Elix Media Komputindo, 2014).
- M, Feance, dan Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. (Yogyakarta: Reviva Cendikia, 2015).
- Situmorang, Helentina, Ratna Agustia, Sunariyanto, Hary Yanto Jailani, Zakaria Habib Al-Ra'zie, Dara Latifa, Muhammad Akbar Maulana, et al. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).
- Sawir, Muhammad, Yeni Fajrin, Almuhajir Haris, Anny Riwayati, Hastangka, Kustiyo, Hafidz Nur Ockta, et al. *Sistem Kebijakan Publik*. (Bandung: Widina Media Utama, 2025).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Press, 2021).
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS, 2012).
- Mosher, Theodore W. *Getting Agriculture Moving: Essentials For Development And Modernization*. New York: Praeger, 1966.
- Nasional, Pusat Bahasa Dan Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Jurnal Artikel

- Adnyana, I Putu Cakra Putra, Dan Muhammad Saleh Mohktar. "Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah Di Provinsi Ntb." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 13, No. 2 (2019): 202–17.
- Agestina, Elita. "The Effectiveness Of Law Changes As Progressive Law Implementation On Law Enforcement By Prioritizing Islamic Law As A

- Benchmark.” *RLJ_Ratio Legis Journal* 1, No. 4 (2022): 464–80.
- Amin, Rizal Irvan, Dan Achmad. “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 4, No. 2 (2020): 205–20.
- Anam, Sahidul. “Tinjauan Konseptual Dan Empiris Atas Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia.” *Jurnal Ismetek* 19, No. 1 (2025): 50–54.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. “Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Jurnal Prespektif XXI*, No. 2 (2016): 83–96.
- Citra Aulia, Amelia, Veronice, Dan Walmadri. “Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi Di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.” *JOSETA Journal Of Socio-Economics On Tropical Agriculture* 7, No. 1 (2025): 28–36. <https://doi.org/10.25077/joseta.V7i1.606>.
- Fatika, Yeka Hendra, Haryono Umar, Dan Dyah Nirmalawati. “Analisis Efektivitas Distribusi Program Pupuk Bersubsidi Di Indonesia” 8, No. September (2025).
- Ginting, Sryani Br. “Pentingnya Integritas Dan Profesionalitas Dalam Penegakan Hukum DARI PERSPEKTIF ETIKA.” *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*, 2018, 46–51.
- Halomoan, Salim, Dwi Evaliza, Dan Zulvera Zulvera. “Analisis Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang.” *JOSETA Journal Of Socio-Economics On Tropical Agriculture* 6, No. 1 (2024): 11–17. <https://doi.org/10.25077/joseta.V6i1.394>.
- Hulyatussyamsiah, Siti Nuri, Hartono Rudi, Dan Oeng Anwarudin. “Adopsi Pemupukan Berimbang Padi Sawah Melalui Penggunaan Urea Berlapis Arang Aktif Di Majalengka.” *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 2019.
- Januri, Dewi Putri Melati, Dan Muhadi. “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN CYBER TERORGANISIR.” *Jurnal Penelitian Hukum* 01, No. 1 (2022): 98.
- Kabupaten Indramayu. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan

- Pertanian Kabupaten Indramayu (2022).
- Marita, Leny, Mohammad Arief, Nurita Andriani, Dan Muhammad Alkirom Wildan. "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis." *Agriekonomika* 10, No. 1 (2021): 1–18.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* VI (2022): 49–58.
- Paminto, Saptaning Ruju, Ibrahim Khalil Ahmad, Dan Zenal Syaepul Rohman. "Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 4 (2024): 114–24.
- Pancarani, Irischa Aulia, Dan Rida Wahyuni. "Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel : Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT . Bumi Sari" 6, No. 2 (2023): 119.
- Putri, Mega Amelia, Dan Kumbara. "Dinamika Subsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan : Perspektif Dari Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Triton* 15, No. 2 (2024): 510–25.
- Ra'is, Dekki Umamur. "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial." *Journal Of Urban Sociology* 5, No. 2 (2022): 109–18.
- Ramadhan, M Arif, Muhammad Akbar Azhari, Muhammad Fikri, Reksi Satriawan, Dan M Yaman. "Tinjauan Yuridis Reforma Agraria Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani" 3, No. 6 (2024): 8700.
- Ratu Ghassani, Dika Supyandi. "Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Jawa Barat Effectiveness Of The Subsidized Fertilizer Program" 10 (2024): 2913–23.
- Retang, Rambu Yesa Konga Ala Elfis Umbu Katongu. "Efektivitas Distribusi Pupuk Subsidi Pada Petani Padisawah Di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawaikabupaten Sumba Timur." *Prosiding Sustainable Agricultural*

- Technology Innovation* 4, No. 1 (2025): 536–48.
- Riani, Zuriani, Hafn Zahara', Dan Dan Hafizin. "Fungsi Kelompok Tani Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Gampong Uteun Bunta Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen." *Jurnal AGRIFO* 6, No. 1 (2021): 23–30.
- Rizki, Dian, Elidar Sari, Dan Yusrizal. "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Responsive Application Of Law In The Establishment Of Law In Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 1 (2022): 83–96.
- Rudy. "Desentralisasi Indonesia: Memupuk Demokrasi Dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2016): 97–102.
- Saputra, Bambang Eka, Muchamad Triyanto, Lalu Murdi, M. Shulhan Hadi, Dan Hary Murcahyanto. "Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Masyarakat Di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5 (2022): 289–301.
- Saraswaty, Amrita Nugraheni. "Kebijakan Publik Dan Ritel Modern : Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Plastik Berbayar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 1, No. 7 (2018): 113–42.
- Shafi, Muhammad Khurruum, Wajiha Raheeq, Dan Qurat Ul Ain Saleem. "Policy Processes : Issues , Agenda Setting , Formulation And Implementation." *Ournal Of Law Social And Management Sciences* 2, No. 1 (2023): 13–20.
- Sidharta, Veranus, Resman Muharul Tambunan, Alifiah Ghaniyyu, Universitas Bina, Saran Informatika, Program Studi Komunikasi, Fakultas Komunikasi, Et Al. "Suatu Kajian : Pembangunan Pertanian Indonesia." *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2021).
- Sihombing, Yennita. "Inovasi Kelembagaan Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan." *UMP Press* 5 (2023): 85.
<https://doi.org/10.30595/Pspfs.V5i.707>.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 7, No. 6 (1977): 462.
- Suhamah, Emay, Dan Kosasih Sumantri. "Implementasi Program Kartu Tani

- Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi.” *Journal Of Sustainable Agribusiness* 3, No. 1 (2024): 16–20. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index>.
- Suhartin Akadji, Nur Insani, Dan Rusmulyadi Rusmulyadi. “Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Kepada Masyarakat.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, No. 2 (2025): 123–30. <https://doi.org/10.62383/Progres.V2i2.1691>.
- Syuhada. “Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum.” *Legitimasi* 9, No. 1 (2020): 133–52.
- Umam, Khaerul, Dedeng Maolani, Dan Widi Maulana Rahman. “Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 10, No. 1 (2019): 32–44.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (N.D.).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (N.D.).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (N.D.).
- Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *JURNAL MIMBAR HUKUM* 19, No. 03 (2007): 335–485.
- Widayati. “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan.” *JURNAL HUKUM UNISSULA* 35, No. 2 (2019): 59–72.
- Yanuarita, Heylen Amildha, Dan Djoko Susanto. “Menakar Pengaruh Modernisasi Dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Pelayanan Publik Di Kota Kediri.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, No. 2 (2020): 112–21.

Wawancara Pribadi

- Jazuli, Anggota Kelompok Tani Sri Murni Segeran Kidul, Wawancara Oleh Penulis, 17 Januari 2026.
- Rudin, Anggota Kelompok Tani Sri Murni Segeran Kidul, Wawancara Oleh Penulis, 17 Januari 2026.

Kashayanto Hengky Jatmiko, Pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, wawancara oleh penulis, Kabupaten Indramayu, 27 Januari 2026.

Website

Ombudsman Republik Indonesia, “Menata Ulang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Analisa Prinsip 7 Tepat untuk Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”, *Ombudsman Republik Indonesia*, 27 September 2025.

Haryono, “Mentan Amran Geram, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Nakal di Indramayu”, *Info Kota Online*, 26 September 2025.

Kontan, Kementrian Dorong Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Lebih Tepat Sasaran, <https://industri.kontan.co.id/news/kementan-dukung-tata-kelola-pupuk-bersubsidi-lebih-tepat-sasaran?> (Diakses Tanggal 12 Juni 2025).

SUARATANICOM. “Kementan Perkuat Tata Kelola Pupuk Subsidi.” Diakses 26 September 2026. <https://Www.Suaratani.Com/2025/09/Kementan-Perkuat-Tata-Kelola-Pupuk.Html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Repunlik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.